

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
DINAS PERHUBUNGAN



RANCANGAN RENJAH

TAHUN
2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Berkah Karunia-Nya, Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disusun dengan baik tepat pada waktunya. Penyusunan RANCANGAN RENJA ini dilakukan setelah dokumen RENJA Dinas Perhubungan 2025 selesai, sehingga indikator-indikator kinerja yang dituangkan didalam RENJA 2026 ini sudah mengacu pada RENJA Dinas Perhubungan 2025.

Dokumen RANCANGAN RENJA Tahun 2026 DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat beserta naskah penetapannya merupakan satu kesatuan utuh, yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2026. Dokumen ini menjadi acuan komitmen bagi seluruh stakeholder bidang perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program untuk 1 (satu) tahun periode kinerja.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, baik disebabkan oleh keterbatasan sumber daya tim penyusun, maupun dikarenakan keterbatasan ketersediaan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan bidang perhubungan. Namun pun demikian pada akhirnya, dengan telah disusun dan ditetapkannya dokumen RANCANGAN RENJA Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat , diharapkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap dapat memberikan kinerja yang berkontribusi bagi kemaslahatan aparatur sipil negara serta bagi umat/masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Aammiin..

Kuala Tungkal, Maret 2025

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Peneliti Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	10
	A. Faktor Penyebab Terpenuhinya program dan kegiatan	48
	B. Implikasi terhadap capaian Program/kKegiatan	49
	C. Kebijakan Dan Solusi	50
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	51
2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	62
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	65
2.5	Penelaahan Terhadap Usulan Program Masyarakat	

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	98
3.2	Tujuan dan Sasaran	100
3.2	Program dan Kegiatan	101
3.3	Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022	115

BAB IV KESIMPULAN	116
-------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	12
Tabel TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2022-2025	52
Tabel TC. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	67
Tabel TC. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa rencana kerja perangkat daerah (RENJA) merupakan perumusan dari rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA), sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RENJA memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. RENJA Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. RENJA merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini adalah dokumen RENJA DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026.

Yang dijadikan acuan dalam penyusunan RENJA DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini adalah UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, PERMENDAGRI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan PERMENDAGRI 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu

diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPd yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tidak terlepas untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan focus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Barat adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan, fungsi Dinas

Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah melaksanakan misi ke-2 (dua) yaitu :

“Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan”

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas bidang perhubungan untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang menunjang pemerataan pengembangan jaringan transportasi dari daerah terpencil ke kota dan mendorong sebagai peluang peningkatan ekonomi masyarakat dan;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global;
- c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.
- d. Meningkatnya tertib laik angkutan umum.
- e. Pemerataan konektivitas melalui pengembangan jaringan terayek antar kabupaten maupun antar desa.

Dari sub agenda bidang perhubungan tersebut tersebut, arah kebijakan dan strategi yang terkait langsung sektor transportasi antara lain :

- a) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
- b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
- c) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahannya

- d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
- e) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengintegrasikan keberhasilan program dengan pemanfaatan anggaran (APBD) yang optimal dan mendukung keberhasilan visi misi lingkup daerah/kabupaten, lingkup provinsi hingga lingkup nasional. Sehingga memberikan efek nyata dan membantu mensejahterakan masyarakat melalui sektor perhubungan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
 5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000M(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Valiadasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkultur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sasaran dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja OPD) merupakan tahapan awal dalam penyusunan Renja OPD. Renja OPD itu sendiri merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sasaran penyusunan RENJA DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah agar kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026:

- a. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- c. Selaras dengan PERUBAHAN RENSTRA DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Terwujudnya pencapaian visi dan misi perhubungan yang mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi kabupaten tanjung jabung barat;

- d. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan perhubungan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- f. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 2021-2026

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD atau SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sub Bab ini mengevaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dan capaianya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau Program Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Renja Renja (Ranwal Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2021 – 2026 sampai dengan tahun 2024 Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2024 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C. 29

Tabel T.C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Tahun 2026
Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi (%) Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab					
							I		II										
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 13	14 = 14/6 x 100%	15					
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia	Dokumen	25	75.000.000	10	55.200.034	5	26.152.000,00	3	0	4.500.000,00	12.700.000,00	26.152.000	85.352.034	60,00%	113,80%	Dishub	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dokumen	25	75.000.000	10	59.200.034	5	11.752.000	3	0	0,00	7.952.000,00	11.752.000	70.952.034	60,00%	94,60%	Dishub	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	18	90.000.000	12	13.100.000	2	0	0	1	0	4.500.000,00	8.900.000,00	874.048.360,00	927.098.360,00	77,78%	30,56%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Bulan	72	23.313.242,363	24	9.863.896,403	12	3.760.169,573	3	0	0	1.053.365,476,00	1.053.365,476,00	0	0	37,50%	58,34%	Dishub
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Bulan	72	22.288.378,363	36	9.401.440,425	12	3.537.919,573	3	0	0	558.949.278,00	1.137.099.656,00	3.505.662,770	12.907.103,195	54,17%	57,91%	Dishub

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disiplin Pegawai	Stel	792	41,67%	47,63%	Dishub
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bulan	72	1.992.428,673	97,78%	Dishub
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Bulan	72	166.702.000	66,67%	199,04%
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor tersedia	Bulan	51	155	94,12%	94,63%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelayanan perkantoran berjalan	Bulan	72	0	66,67%	90,60%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	72	710.262,808	58,33%	169,04%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	72	-	54,17%	50,51%

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terlaksana	Bulan	72	84	1,409,763,550	15,065,439	65,28%	93,98%	Dishub
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	84	1,392,000,000	114,648,203,00	0,00	28,57%	1,08%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	24	111,308,161,00	0,00	0,00%	0,00%	Dishub
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	44	26,373,600	123,340,876,00	0,00	551,799,000	7,69%	24,42% Dishub
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	200,000,000	214,965,800	0,00	0,00	0,00%	0,00% Dishub

RANCANGAN RENJA TAHUN 2026

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran meningkat	Bulan	72	192	41	5	59,72%	56,94%	49,57%	Dishub				
	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Bulan	72	29.713.730,00	113.753.447	478.265.101	227.881.621,00	29.218.946,00	187.561.289	3.022.712.226	59,72%	35,82%	43,78%	Dishub
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	Unit	550	72	192	6	1	170.081.700,00	1.365.250.551	1.090.791.252	53,13%	62,50%	51,22%	Dishub
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Administrasi Umum Meningkat	Unit	192	36	103.394.024	517.720.000	73.807.842	2.544.447.125	1.027.895.851	1.027.895.851	10	10	10	Dishub
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Administrasi Umum Meningkat	Unit	192	36	103.394.024	517.720.000	73.807.842	2.544.447.125	1.027.895.851	1.027.895.851	192	96	96	Dishub

	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peralatan gedung kantor tersedia	Unit	324	154.017.404	304.580.613	56,17%	197,76%	Dishub
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	34	1.420.000.000	262.089.810	41,18%	18,46%	Dishub
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	72	4.386.180.000	3.885.893.954	41,67%	88,59%	Dishub
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	72	875.000.000	558.534.954	33,33%	63,83%	Dishub
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Disediakan	Unit	25	875.000.000	558.534.954	36,00%	63,83%	Dishub
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang laik jalan	Unit	5000	200.000.000	49.980.000	0,14%	20,50%	

RANCANGAN RENJA TAHUN 2026

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	34	72	681.422.000	3.327.359.000	38,24%	151,43%	
	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jarngan Jalan	Persentase Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jarngan Jalan	%	11	0	399.377.800,00	387.720.000,00	22,96%	94,76%	Dishub
	Pengawasan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian	Operasi	196	72	80.938.174,00	242.398.000,00	242.398.000,00	18.240.000,00	Dishub
	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	1	3	171.162.444,00	183.240.000,00	183.240.000,00	89.245.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Operasi	30	72	29.943.582	2.334.001.000	2.334.001.000	465.955.000	

	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	%	72	72	24	24	24	24	24	24	24	24	33,33%	3,98%	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	190	190	55	55	55	55	55	55	55	55	28,95%	3,98%	
	Program Pengelolaan Pelayaran													50,00%	39,56%	Dishub
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	%	72	72	24	24	24	24	24	24	24	24	50,00%	66,38%	Dishub
	Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut & sungai	Bulan	72	72	36	36	36	36	36	36	36	36	66,67%	66,38%	Dishub
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	72	72	24	24	24	24	24	24	24	24	40,28%	18,38%	Dishub
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang sudah dibangun	Unit	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	100,00%	77,45%	Dishub

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pelayanan atau Pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2021 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas telah menetapkan 7 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi, yaitu:

1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia
2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia4) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal
4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik
5. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia
6. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan
7. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari rata - rata capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Bila dilihat dari segi pendanaan, dalam tahun 2024 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp.8.290.200.212,- pada APBD

Perubahan, terealisasi sebesar Rp. 7.934.437.954,-, (95,71%) , dengan rincian sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 5,603,132,212,- Terealisasi sebesar Rp. 5,285,775,124 dengan persentase (94,34%).
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1,174,968,000,- Terealiasasi sebesar Rp. 1,153,142,430,- dengan persentase (98,14%)
- Program Pengelolaan Pelayaran Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1,512,100,000,- Terealiasi Sebesar Rp. 1,495,520,400,- dengan persentase (98,9%)

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 8 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.100.000 (87,92%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja Belanja cetak atau photocopy dokumen dokumen perencanaan untuk tahun 2024.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 68.000.000, terealisasi sebesar Rp. 52,818,150 (77,67%). Sisa anggaran sebesar Rp. 15,181,850 merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja asuransi kendaraan 2024.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 469,909,000, terealisasi sebesar Rp. 417,117,749 (88,77%). Sisa anggaran sebesar Rp. 417,117,749 merupakan Merupakan efisiensi dari Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas

dikarenakan terdapat kerusakan pada salah satu kendaraan dinas operasional lapangan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan- penyempurnaan Kinerja Dinas untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Faktor Faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang awalnya dinas perhubungan, informatika dan komunikasi menjadi dinas perhubungan, sehingga anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) di bidang informatika dan komunikasi tidak dapat direalisasikan dan menjadi silpa, yang berpengaruh terhadap rendahnya serapan anggaran dinas perhubungan
2. Peraturan di bidang Perhubungan, baik darat dan laut memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang kadang-

kadang dilapangan menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan manajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/UPTD dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. diperlukan kebutuhan komposisi di Bidang Darat dan Laut juga yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan mengingat dua moda tersebut terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.
4. Pengalokasian Anggaran Belum Sepenuhnya Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja. Kendala yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran, sedangkan indikator yang harus dicapai berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tertulis secara kuantitif. Dengan adanya target atau angka/digit tertentu pada indikator tertentu, juga telah dapat ditentukan berapa Rupiah alokasi biaya yang diutuhkan untuk mencapainya. Namun indikator yang telah ditetapkan belum berbanding lurus dengan pengalokasian anggaran pada suatu program / kegiatan yang telah ditentukan, pada priode Rencana Tahunan yang telah disusun setiap tahunnya.
5. Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang besar, hal ini juga dapat menjadi kendala. Biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, memerlukan jalan keluar yang sistematis dan terukur, baik secara peraturan maupun penganggaran.

a. Implikasi yang timbul terhadap capaian program/kegiatan tahun 2024 :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jasa tranportasi pada bidang darat maupun laut dengan

Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.

5. Menurunnya angka kecelakaan di bidang perhubungan darat dan laut.
6. Meningkatnya PAD pada sektor Terminal, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Kepelabuhan
7. Meningkatnya tertib laik kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar.

b. Kebijakan/solusi untuk mengatasi faktor-faktor tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayahPembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub Bab Capaian Analisis Kinerja DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat memaparkan kajian terhadap capaian kinerja DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan indikator sasaran (PERUBAHAN RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2021-2026), indikator kinerja utama (IKU), serta indikator kinerja kunci (IKK) Bidang Perhubungan sesuai dengan PP RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah., telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis

1.1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut

1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia

1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia

1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia

1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik

1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut

1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia

1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan

1.2.3. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam (table T-C.30) sebagai berikut :

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi presentase menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik. Dapat disimpulkan bahwa outcome tercapai cukup baik dengan realisasi pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,96% dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 101,22%.

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

TABEL T-C 30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022-2025**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	ARGET RENSTRA SKPD TAHUN KI				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Fokus Layanan Urusan Wajib													
7	PERHUBUNGAN												
7,1	Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	Dok	2		5	5	3	3					
7,2	Pemeliharaan Halte Sungai	Lokasi	1		3	3	3	0					
RPJMD BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN													
1	Tersedianya Jumlah pelabuhan laut/LLASDP dan terminal bus	Unit	5		1	1	1	1	0	0	2	3	
2	Tersedianya Halte dan Dermaga Sungai Kondisi Baik	Unit	13		3	4	3	3	3	3	3	3	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN													
1. PELAYANAN ANGKUTAN JALAN													
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan													
1)	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	75		75	75	75	75	98	98	98	98	

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

	2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	95	95	95	95	
b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan													
	1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
	2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	40		40	40	40	40	38	38	38	38	
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	ARGET RENSTRA SKPD TAHUN K				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	20
c. Fasilitas Perlengkapan Jalan													
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	57,8	57,4	57,8	57,8	
d. Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor													

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

1) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	%	60		60	60	60	60	27,8	20,4	21,8	27,8	
e. Sumber Daya Manusia (SDM)												
1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	%	50		50	50	50	50	10	10	10	20	
2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	%	100		100	100	100	100	10	10	10	20	
3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	%	40		40	40	40	40	5	5	5	5	
4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	%	100		100	100	100	100	10	11	12	12	
f. Keselamatan												
1) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	96,7	97,7	98	98,1	

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

2. PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU														
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau														
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	ARGET RENSTRA SKPD TAHUN KISI				CAPAIAN TAI PROYEKSI				CATATAN ANALISI	
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2) Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	40		40	40	40	40	47	47	47	48		
b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau														
	1) Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	%	60		60	60	60	60	50	50	50	50		
c. Keselamatan														

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

2) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
b. Tersedianya Prasarana Angkutan Penyeberangan												
Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	%	60		60	60	60	60	50	50	50	50	
c. Keselamatan												
1). Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	87	87	89	90	
d. Sumber Daya Manusia												

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

	2). Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	%	50		50	50	50	50	46	48	48,5	48,5	
4. PELAYANAN ANGKUTAN LAUT													
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut													
	1). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	90		90	90	90	90	88	88	88	89	
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN K				SI CAPAIAN TAHUN		PROYEKSI		CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
b. Jaringan Pelayanan Prasarana Angkutan Laut													

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	60		60	60	60	60	65	65	65	65	
c. Keselamatan												
Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	97	97	97	97	
c. Sumber Daya Manusia (SDM)												
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	%	100		100	100	100	100	97	97	97	97	
LPPD BIDANG PERHUBUNGAN												
1												
2												

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang Komunikasi dan Informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat

menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

1. Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat;
- b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kepadatan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

2. Permasalahan, Dampak/peluang Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap sasaran Kabupaten. Tanjung Jabung Barat

Urusan Perhubungan

a. STRENGTHS (KEKUATAN):

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
2. Anggaran yang kurang memadai;
3. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
4. Belum tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah antara Kecamatan dan Desa-desa ke Kabupaten.
5. Sarana dan prasarana di beberapa unit harus diperbaiki.

c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.
3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.

d. THREATS (ANCAMAN):

1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi

e. Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. kepada masyarakat dalam jangka panjang. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.
2. Peraturan perundangan dan pertentangan kepentingan peraturan perundangan sektoral berpengaruh besar terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan berpotensi adanya ketidak konsistensi perencanaan dan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan evaluasi program/kegiatan;

3. Integrasi perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya implementasi integrasi perencanaan dan perencanaan berdampak pada tidak tercapainya target indikator kinerja program/kegiatan;
4. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai, ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini dikarenakan masih lemahnya manajemen data dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan;
5. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian;
6. Kapasitas aparatur perencana, kapasitas sumber daya perencana, kapasitas sumber daya perencana yang berkompeten menjadi permasalahan serius dalam peningkatan kualitas perencanaan sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur purna tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium penerimaan pegawai baru;
7. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
8. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.
9. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Renja RKPD Tahun 2026

Rancangan Renja RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Dalam Rancangan Renja RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman Perencanaan Pembangunan dengan membandingkan program dari pemerintah kota dengan

kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program untuk dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan kota/kabupaten.

Rancangan Renja untuk RKPD Tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, Proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja daerah untuk 2024 sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah
2. Dukungan RPJMN 2021 – 2026;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan ;
4. Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
6. Pendukungan implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Renja RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perhubungan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Renja RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Renja RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap review Rancangan Renja RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 disajikan dalam Tabel T.C-31 sebagai berikut:

2.5. Penelaahan Usulan Program Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujuakan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan di bidang perhubungan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Tabel T-C 32**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KAUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT****Nama OPD : Dinas Perhubungan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1 PROGRAM PENGELOLAAN PLAYARAN					
Kegiatan	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKp untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	-	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKp untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	-
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Desa Lumahan RT. 02 Kecamatan Senyerang	Dokumen rencana induk DLKR/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau Serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	1 Dokumen	Pembangunan Halte Sungai/Derma ga Sungai Desa Lumahan RT. 02 Kecamatan Senyerang
		Desa Pelabuhan dagang		1 Dokumen	Pembangunan Dermaga TBS di Daerah Teluk

2.6. Penelaah Terhadap Usulan Musrenbang dan Pokir DPRD

Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Renja OPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencna Kerja Pemerintah Daerah Pasal 131 ayar (1) “Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja renja perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 130.

Proses pelaksanaan Penyempurnaan Rancangan Renja Renja Opd melalui Rapat Forum Perangkat Daerah dalam Rangka RKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2024 di Ruang Rapat pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyepakati hal – hal sebagai berikut :

MENYEPAKATI

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang kecamatan dan pokir DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| KEDUA | : Menyepakati daftar usulan Musrenbang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini |
| KETIGA | : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II & III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. |
| KEEMPAT | : Kepmendari Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, yang memuat 3 Program, 30 Kegiatan dan 72 Sub kegiatan . |
| KELIMA | : Relevansi Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dengan Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat termuat dalam Misi ke-3 yaitu “Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan” |
| KEENAM | : Dalam Rancangan Renja Tahun 2026 telah termuat 15 Usulan Pokir DPRD |

KETUJUH

dan 16 Usulan dari Musrenbang Kecamatan serta direkap melalui aplikasi SIPD RI Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEDELAPAN

: Untuk usulan Pokir DPRD dan Usulan Musrenbang Kecamatan yang telah disepakati pada Forum Lintas Perangkat Daerah Harus di Muat Kedalam Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2026

KESEMBILAN

: Untuk Usulan Kecamatan Tungkal Ilir yang Berada di Jl. Harapan RT.12, Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal Harapan perlu dilakukan : survey lokasi mengenai status lahan dan lainnya

Untuk Usulan Kecamatan Seberang Kota yang berada di RT 03 Kelurahan Tungkal 5, Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Tungkal V, lokasi tersebut berada searah dengan jalur puskesmas. perlu dilakukan survey untuk ketepatan lokasi pembangunan. dan Mengusulkan Proposal ke Dinas Perhubungan

KESEPULUH

: 15 Usulan Pokir DPRD dan 16 Usulan dari Musrenbang Kecamatan serta direkap melalui aplikasi SIPD RI Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disepakati untuk diterima dan di usulkan dalam Rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2026.

KESEBELAS

: Melihat banyaknya usulan kebutuhan mengenai pembangunan halte sungai yang merupakan kebutuhan utama penghubung dari desa ke kota maka dilakukan perubahan target dan pagu anggaran pada sub kegiatan **Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau**, yang semula target 1 Unit dengan pagu Rp. 2.500.000.000 menjadi 2 unit dengan Pagu Anggaran Rp. 6.000.000.000,-.

LAMPIRAN USULAN POKIR DPRD DAN MUSRENBANG TAHUN 2026 :

Lampiran II : Berita Acara Hasil Kesepakatan
 Forum Perangkat Daerah
 Nomor : 500.11/ /DISHUB/2025
 Tanggal : 20 Februari 2025

DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS WILAYAH SERTA POKIR DPRD
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
DAFTAR USULAN MUSRENBANG KECAMATAN										
Kecamatan Tungkal Ilir										
1	Kecamatan Tungkal Ilir	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Nelayan mengalami kesulitan ketika hendak menambatkan perahu karna Dermaga yang ada rusak berat (Pembangunan Dermaga Perioritas)	Jl. Harapan RT.12, Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal Harapan	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Kecamatan Seberang Kota										
2	Kelurahan Tungkal V	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Dermaga/Halte sungai Puskesmas Tungkal V Volume 1 Unit	RT 03 Kelurahan Tungkal 5, Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Tungkal V	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Kecamatan Kuala Betara										
3	HARMANTO	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Dermaga/Pelabuhan Bongkar Muat (P. 20 meter L. 3 meter)	RT.02 Dusun Teladan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Sungaidualap	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

4	RUSLI	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	REHAB DERMAGA HALTE SUNGAI PONCO REJO DESA BETARA KANAN	RT.01 DUSUN PONCO REJO DESA BETARA KANAN , Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Betara Kanan	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	300.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
5	Kelurahan Betara Kiri	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Tambatan Perahu	RT.01,RT.04,RT.09,RT.12 Betara Kiri Parit Deli, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Betara Kiri	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Kecamatan Pengabuan											
6	M. SAIDIN	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Dermaga Halte Sungai RT 02 (30 x 2) Dusun Karya Indah	Dusun Karya Indah RT 002, Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Karya Maju	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
7	Solikhun	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Dermaga/halte laut volume 1 unit	RT 01 dusun utama jaya, Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Parit Bilal	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

8	Kelurahan Teluk nilau	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Dermaga Bongkar Muat RT. 01 Kelurahan Teluk Nilau Volume 6 M x 5 M	RT. 01 Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Teluknilau	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
9	Muhaimin	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Rehab Dermaga Apung (Halte Air) 40x10 meter	RT.07, Dusun Utama, Desa Pasar Senin , Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Pasar Senin	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	300.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
Kecamatan Bram Itam											
10	Supian Kahpi	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	REHAB BERAT HALTE AIR/DERMAGA	RT 01 DUSUN SEMAU, Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Semau	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	500.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
Kecamatan Senyerang											
11	Kelurahan Senyerang	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Dermaga apung atau Hakte sungai RT 04 Volume 1 Unit	RT. 04 Kelurahan Senyerang , Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

12	Taslim, S.A.P	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	1. Pembangunan Halte sungai, volume 25 x 8 meter	Parit 8 RT 04 Dusun mekar, Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Sungailandak	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
13	SUTIMAN	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Dermaga Apung/Halte Sungai, 1 Unit	Parit 7 RT.14 Dusun Tanjung Kalimantan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Sungaikayu Aro	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
14	ISMAIL	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Halte Sungai RT. 01 Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan	RT 09 Desa Lumahan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Lumahan	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
15	Choiri	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	4. PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG RT.001 DUSUN SUKA MULYA	RT.001 DUSUN SUKA MULYA DESA SUNGAI RAMBAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Sungairambai		Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp	3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

Kecamatan BETARA

16	Sadikin	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Dermaga 1 Paket	RT. 005 Parit Burhan Dusun Rantau Panjang , Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Makmur Jaya	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
----	---------	--	-----------------------------	--	--------	--	---	-------	---------------------	--------------------------------------

Lampiran II : Berita Acara Hasil Kesepakatan
 Forum Perangkat Daerah
 Nomor : 500.11/ /DISHUB/2025
 Tanggal : 20 Februari 2025

DAFTAR USULAN POKIR DPRD

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR USULAN POKIR DPRD										
KOMISI I										
No	Pengusul	Uraian	Permasalahan	Lokasi	Taging OPD	Rekomendasi SKPD	Satuan	Pagu Anggaran	Sub Kegiatan	
1	H. ASSEK	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN HALTE SUNGAI	RT 02 KUALA DUA DESA SUNGSANG KECAMATAN SENYERANG, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	paket	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
2	H. ASSEK	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Rehab Sedang Halte Sungai	RT 01 parit pasirah desa sungai kepayang kecamatan senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026,	1	paket	Rp 300.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai
3	H. ASSEK	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Rehab Sedang Halte Sungai	RT. 06 PARIT KERAMAT DESA DESA MUARA SEBERANG KECAMATAN SEBERANG KOTA Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026,	1	paket	Rp 250.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau

KOMISI II

4	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembuatan Dermaga Penghubung Volume 3 x 20 Meter	RT 05 ke RT 08 Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkal Ilir , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	paket	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
5	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembuatan Deramaga	Parit 6 Seberang Desa Semau Kecamatan Bram Itam , Kab. Tanjung Jabung Barat, ,	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	paket	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
6	IQBAL	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PELABUHAN PENYEBERANGAN	DESA SUNGAI SERINDIT KECAMATAN PENGABUAN , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	paket	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

7	DEDI IRAWAN	Pemeliharaan dan Penyediaan PSU skala Kawasan Perumahan dan permukiman (Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Ruang Terbuka Hijau (RTH), jembatan dan Jalan lingkungan)	PENGADAAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS	DN 050/V SUBAN, SDN 078 SIMPANG RAMBUTAN & SMP 5 TUNGKAL ULU, Kab. Tanjung Jabung Barat,	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026	1	paket	Pemeliharaan Dermaga Sungai
KOMISI III									
8	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Rehab Berat Halte Sungai	RT.01 DESA SEMAU KECAMATAN BRAM ITAM , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026,	1	paket	Rp 500.000.000,00
9	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Rehab Berat Halte Sungai	RT 01 DESA SEMAU KEC. BRAM ITAM, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026,	1	PAKET	Rp 500.000.000,00
10	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Halte Sungai/Dermaga Sungai	RT 03 KEL. TUNGKAL V KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	paket	Rp 3.500.000.000,00

11	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Halte Pelabuhan	RT.02 Desa Teluk Sialang, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	paket	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
12	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pemagaran Dermaga Tambatan Perahu 50 x 1,5 M	RT. 12, Kelurahan Tungkal Harapan, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026,	1	paket	Rp 100.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
13	ALBERT CHANIAGO	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Tambatan Perahu P. 15 M x L. 2 M	RT. 01, RT. 04, RT. 09 dan RT. 12, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	paket	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
14	TUMIRIN	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	REHAB DERMAGA KAYU	RT 04 SUNGAI RAMBAI KECAMATAN SENYERANG, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026,	1	paket	Rp 500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
15	H. FAHRIZAL, S.Pd	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI DESA GEMURUH	DESA GEMURUH RT 07 KEC.TUNGKAL ULU , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2026, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	PAKET	Rp 3.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan ini mempunyai maksud untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas antara Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kementerian Perhubungan yang berdasarkan pada dokumen Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2026, visi dan misi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Visi: Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong;

Misi:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;

3. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Sasaran strategis pembangunan transportasi nasional Tahun 2020-2026 adalah:

- 1) Terwujudnya konektivitas nasional
- 2) Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan
- 3) Meningkatkan keselamatan transportasi
- 4) Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten
- 5) Meningkatkan tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum
- 6) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian
- 7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
- 8) Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan.

Berdasar hasil telaah Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2026 yang berkaitan dengan kepentingan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan. Dimana hal

tersebut sesuai dengan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Mewujudkan Kab. Tanjung Jabung Barat melalui sistem transportasi terintegrasi yang terjangkau, handal, modern, dengan angkutan umum sebagai layanan utama.

Dari indikator sasaran dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2026, dapat dianalisis faktor penghambat dan faktor pendorong terhadap target kinerja dalam Renstra Kementerian Perhubungan. Beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pembagian target kinerja per masing-masing provinsi dalam dokumen Renstra Kementerian Perhubungan.
2. Pencapaian target kinerja dalam Renstra Kementerian Perhubungan sebagian tidak dapat dilimpahkan ke masing-masing Pemerintah Daerah karena pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan.
3. Kewenangan terkait transportasi udara berada pada Kementerian Perhubungan.

Beberapa faktor pendorong tercapainya target tersebut:

1. Terdapat peraturan perundangan daerah yang mendukung pelaksanaan capaian kinerja.
2. Terdapat BUMD bidang transportasi dan pihak swasta bersama Pemerintah Daerah menyokong konektivitas transportasi.
3. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk sarana transportasi umum yang rutin dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan transportasi.

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan dan angkutan umum perkotaan.

a. VISI DAN MISI RPJMD

Visi RPJMD	“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” (<i>Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan ber-Inovasi</i>)
Misi RPJMD :	
Misi 1	: 1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
Misi 2	: 2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
Misi 3	: 3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

- Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 3 RPJMD yaitu Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan. Dengan Sasaran 3.3 Menurunnya ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan
- Arah pembangunan
 - Konektivitas ekonomi domestik dengan daerah luar
 - Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas
 - Pelabuhan pengumpan dan pelabuhan lainnya dengan kapasitas memadai
 - Jaringan transportasi darat dan laut terintegrasi

- Arah Kebijakan
 - Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyad yang modern terintegrasi)
 - Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya
 - Penyediaan angkutan massal
 - Peningkatan sarana prasarana perhubungan

Prioritas Pembangunan :

- Konektivitas antar desa/kecamatan/kabupaten

Program Prioritas ;

- Mengakomodir 1 usulan prioritas Musrenbang Desa/kelurahan per desa/kelurahan.

Operasional (Kebijakan/Rencana/Program) :

- Peningkatan/pembangunan Halte Sungai
- Peingkatan/pembangunan Jembatan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah (TABEL 3.2)

TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6 Unit
		1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	C	C	C	C	B	B	B
	1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	30 Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	55 Unit	255 Unit
		1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1150 Unit	1170 Unit	1180 Unit	1210 Unit	1300 Unit	1350 Unit	1350 Unit
		1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	50 Kasus	40 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	5 Kasus	5 Kasus

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	70	78	80	80	85	85
		2.1.2. Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	A	A
		2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0 Temuan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program, Kegiatan, serta Sub Kegiatan yang direncanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Perhubungan menggunakan nomenklatur program sesuai dengan urusan perhubungan untuk program dan kegiatan teknis, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk program dan kegiatan urusan penunjang kantor. Penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja tahun 2026 dalam proses pembuatannya memperhatikan beberapa faktor yaitu;

- 1) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal pada dinas perhubungan setiap tahun dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan publik bidang perhubungan.
 - 2) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan Guna mendukung potensi ekonomi daerah, Dinas Perhubungan membantu ketertiban , kelancaran dan keselamatan transportasi atau pengguna jalan melalui kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Operasional Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan antara lain meliputi :

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2022-2026 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2022 -2026 adalah sebagai berikut:

Program, Kegiatan dan Subkegiatan

a. Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan.

1. Sebagai Relevansi Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan aksebilitas untuk masyarakat daerah dari desa sampai ke kota.

b. Uraian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. **Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**
- b. **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan**

3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- b. Pembangunan Gedung Terminal
- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- b. Peningkatan Kapasitas Penilaian Andalalin
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**Sub Kegiatan :**

- a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan

11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili

Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

**2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau
yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

**3. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian
Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api
Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang

Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

5. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal

- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal

6. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

7. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal

- b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal

8. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian

Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

9. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhadi Pelabuhan Pengumpulan Lokal

10. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal

11. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal

12. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPK Pelabuhan Pengumpulan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPK Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPK Pelabuhan Pengumpulan Lokal

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program Rutin terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 20 kegiatan.
- b. Program Wajib terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 14 kegiatan.

Dapat di totalkan keseluruhan Setiap OPD terdiri dari program rutin dan program wajib adalah 10 program, terdiri 34 kegiatan

A. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya.

B. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Tabel di bawah

Tabel**Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026**

No	Uraian	Target (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp. 70.000.000,-
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 0'-
3	Retribusi Terminal	Rp. 0,-
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Rp. 600.000.000,-
	Jumlah	Rp. 720.000.000,-

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)

Tabel T.C.33
Matriks Rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Perkiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target	Pagu Anggaran (RP)	Sumber Dana		Target	Rp
						1	2	3	4		5	6
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	Dishub	100%	Rp 8.242.760.699,58	APBD		100%	Rp 8.242.760.699,58
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	Dishub	16	Rp 77.000.000,00	APBD		16	Rp 77.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dishub	4	Rp 12.000.000,00	APBD		4	Rp 12.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp 5.000.000,00	APBD		1	Rp 5.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp 5.000.000,00	APBD		1	Rp 5.000.000,00

		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000,00	APBD		1	Rp	5.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000,00	APBD		1	Rp	5.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Dishub	3	Rp	20.000.000,00	APBD		3	Rp	20.000.000,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Dishub	5	Rp	25.000.000,00	APBD		5	Rp	25.000.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Laporan	Dishub	100%	Rp	5.185.000.000,00	APBD		100%	Rp	5.185.000.000,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/Orang	Dishub	12/30	Rp	5.000.000.000	APBD		12/30	Rp	5.000.000.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Dishub	2	Rp	180.000.000	APBD		2	Rp	180.000.000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Dishub	1	Rp	5.000.000	APBD		1	Rp	5.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	%	Dishub	100%	Rp	210.000.000,00	APBD		100%	Rp	210.000.000,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	APBD		1	Rp	5.000.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dishub	8	Rp	200.000.000	APBD		8	Rp	200.000.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Dishub	1	Rp	5.000.000	APBD		1	Rp	5.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	Dishub	134	Rp	255.000.000,00	APBD		134	Rp	255.000.000,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Dishub	132	Rp	195.000.000	APBD		132	Rp	195.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Dishub	2	Rp	60.000.000,00	APBD		2	Rp	60.000.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Prangkat Daerah	%	Dishub	100%	Rp	631.590.433,80	APBD		100%	Rp	631.590.433,80

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	210	Rp	4.990.434	APBD		210	Rp	4.990.434
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor	Paket	Dishub	6	Rp	75.000.000	APBD		6	Rp	75.000.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Dishub	12	Rp	25.000.000	APBD		12	Rp	25.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	800	Rp	25.000.000	APBD		800	Rp	25.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Dishub	12	Rp	95.000.000	APBD		12	Rp	95.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dishub	12	Rp	6.600.000	APBD		12	Rp	6.600.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Dishub	12	Rp	400.000.000	APBD		12	Rp	400.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	Dishub	29	Rp	512.000.000,00	APBD		29	Rp	512.000.000,00

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Dishub	2	Rp	100.000.000	APBD		2	Rp	100.000.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Dishub	3	Rp	120.000.000,00	APBD		3	Rp	120.000.000,00
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Dishub	10	Rp	50.000.000	APBD		10	Rp	50.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	1	Rp	67.000.000	APBD		1	Rp	67.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	10	Rp	100.000.000	APBD		10	Rp	100.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	3	Rp	75.000.000	APBD		3	Rp	75.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	Dishub	12	Rp	174.330.801,78	APBD		12	Rp	174.330.801,78
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Dishub	12	Rp	1.316.185	APBD		12	Rp	1.316.185
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Dishub	1	Rp	150.000.000	APBD		1	Rp	150.000.000

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Dishub	1	Rp 23.014.616,58	APBD		1	Rp 23.014.616,58
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik	Unit	Dishub	95	Rp 1.197.839.464	APBD		95	Rp 1.197.839.464
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Dishub	2	Rp 200.000.000	APBD		2	Rp 200.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Dishub	32	Rp 584.430.000,00	APBD		32	Rp 584.430.000,00
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Dishub	54	Rp 33.409.464,00	APBD		54	Rp 33.409.464,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Dishub	7	Rp 380.000.000	APBD		7	Rp 380.000.000
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai	1.1 Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai Danau	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	%	Dishub	100%	Rp 3.065.000.000	APBD		100%	Rp 3.015.000.000	
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dishub	0	Rp 50.000.000	APBD		0	Rp -	

Danau dan Penyeberangan	dan Penyeberangan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokume n	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokume n	Dishub	0	Rp	50.000.000	APBD		0	Rp	-
		2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokume n	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		2.15.02.2.01.0006 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokume n	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokume n	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Unit	Dishub	45	Rp	185.000.000	APBD		45	Rp	185.000.000
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	Dishub	25	Rp	150.000.000	APBD		25	Rp	150.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	20	Rp	35.000.000	APBD		20	Rp	35.000.000
		2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Dishub				APBD				
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	Dishub	100%	Rp	1.000.000.000	APBD		100%	Rp	1.000.000.000

		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	Dishub	0	Rp	APBD		0	Rp
		2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen	Dishub	0	Rp	APBD		0	Rp
		2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	Dishub	0	Rp	APBD		0	Rp
		2.15.02.2.03.0008 Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Unit	Dishub	0	Rp	APBD		0	Rp
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	Dishub	1	Rp 1.000.000.000	APBD		1	Rp 1.000.000.000
		2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		Dishub			APBD			
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	Dishub	0	Rp	APBD		0	Rp
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	Dishub	0	Rp	APBD		0	Rp
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Dishub	4	Rp 40.000.000	APBD		4	Rp 40.000.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dokumen	Dishub	100%	Rp	APBD		100%	Rp

		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	Dishub	100%	Rp	400.000.000	APBD		100%	Rp	400.000.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	Dishub	1	Rp	400.000.000	APBD		1	Rp	400.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparaturs yang mengikuti diklJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural	Orang	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	Dishub	1000	Rp	50.000.000	APBD		1000	Rp	50.000.000

			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dishub	1000	Rp	50.000.000	APBD		1000	Rp	50.000.000
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	2	Rp	20.000.000	APBD		2	Rp	20.000.000
			Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Dishub	8	Rp	100.000.000	APBD		8	Rp	100.000.000
			2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.05.0009 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
1.2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberang			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	Dishub	100%	Rp	1.105.000.000	APBD		100%	Rp	1.105.000.000

			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp	85.000.000	APBD		1	Rp	85.000.000
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	36	Rp	990.000.000	APBD		36	Rp	990.000.000
			2.15.02.2.06.0006 Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.06.0007 Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.06.0009 Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.06.0010 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.06.0011 Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.06.0012 Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-

			2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	3	Rp	30.000.000	APBD		3	Rp	30.000.000
		narasi diubah	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.06.0018 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Unit	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		%	Dishub	100%	Rp	75.000.000	APBD		100%	Rp	75.000.000
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	Dishub	4	Rp	50.000.000	APBD		4	Rp	50.000.000
			Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000
		Narasi diubah	2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi		Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Dishub	1	Rp	10.000.000	APBD		1	Rp	10.000.000

		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan		Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	Razia/o perasi gabungan	Dishub	2	Rp	50.000.000	APBD		2	Rp	50.000.000

			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	2	Rp	75.000.000	APBD		2	Rp	75.000.000
			2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp	175.000.000	APBD		100%	Rp	175.000.000
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-

			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	5	Rp	175.000.000	APBD		5	Rp	175.000.000
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp	15.000.000	APBD		100%	Rp	15.000.000
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000

			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp	-	APBD		100%	Rp	-
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	Dishub	1	Rp	10.000.000	APBD		1	Rp	10.000.000
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp	10.000.000	APBD		1	Rp	10.000.000
1. Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.	1.1 Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	Dishub	100%	Rp	9.700.000.000	APBD		100%	Rp	6.200.000.000	
		2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam			Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-	

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2.15.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD	-	0	Rp
		2.15.03.2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Dishub	0	Rp	-	APBD	-	0	Rp
		2.15.03.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD	-	0	Rp
		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Percentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	Dishub	100%	Rp	15.000.000	APBD	-	100%	Rp 15.000.000

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp	15.000.000	APBD		100%	Rp	15.000.000

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp	1.100.000.000	APBD		100%	Rp	1.100.000.000

			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp	10.000.000	APBD		1	Rp	10.000.000
			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	12	Rp	1.090.000.000	APBD		12	Rp	1.090.000.000

			2.15.03.2.06.0003 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	0	Rp	-	APBD	0	Rp	-
			2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Dishub	0	Rp	-	APBD	0	Rp	-
			2.15.03.2.06.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	0	Rp	-	APBD	0	Rp	-

			2.15.03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal			Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.03.2.08.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp	10.000.000	APBD		100%	Rp	10.000.000
			Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-

			Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	3	Rp	10.000.000	APBD		3	Rp	10.000.000
			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	%	Dishub	100%	Rp	10.000.000	APBD		100%	Rp	10.000.000
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal\	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-

			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Dishub	1	Rp	10.000.000	APBD		1	Rp	10.000.000
			Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKp untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKp untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	100%	Rp	535.000.000	APBD		100%	Rp	535.000.000
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dishub	10	Rp	500.000.000	APBD		10	Rp	500.000.000
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dishub	2	Rp	25.000.000	APBD		2	Rp	25.000.000

		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Dishub	1	Rp	10.000.000	APBD		1	Rp	10.000.000
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Dibangun	Unit	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpulan loka	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Tersedia	Laporan	Dishub				APBD				
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	100%	Rp	7.955.000.000	APBD		100%	Rp	4.455.000.000

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	4	Rp	950.000.000	APBD		4	Rp	950.000.000
			2.15.03.2.13.0008 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.03.2.13.0009 Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi		Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Dishub	1	Rp	10.000.000	APBD		1	Rp	10.000.000
			Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	Dishub	2	Rp	6.000.000.000	APBD		1	Rp	2.500.000.000
			Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	Dishub	3	Rp	995.000.000	APBD		3	Rp	995.000.000
			Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal	%	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000
			Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Percentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal	%	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000
			Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000
			2.15.03.2.18 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal			Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-

			2.15.03.2.18.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			2.15.03.2.18.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-
			Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPK Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPK Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPK Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPK Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPK Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKPK Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	APBD		1	Rp	15.000.000
JUMLAH TOTAL PERTAHUN							Rp	21.007.760.700				Rp	17.457.760.700





BAB IV

KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

4.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 2026 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

Kuala Tungkal, Maret 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SYAMSUL JUMARI, S.Sos
Pembina Ulama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001